

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jateng

Halaman 6

Pemprov Pacu Penerimaan Pajak Daerah

Tujuh Kabupaten/Kota Masuk Zona Merah

SEMARANG - Pemprov Jateng terus berupaya memacu pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sedikit mengalami perlambatan. Tujuh kabupaten dan kota ada di zona merah dengan pertumbuhan penerimaan pajak di bawah 7%.

Kondisi yang memberatkan daerah tersebut dipengaruhi perlemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, kebijakan pemerintah menutup defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan pajak rokok pada triwulan III dan IV dinilai bakal berpengaruh pada belanja daerah.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Ihwan Sudrajat mengungkapkan untuk mengatasi hal itu, salah satunya program penagihan tunggakan Rp 1 triliun dicanangkan serta mengintensifkan sosialisasi di masyarakat.

"Hingga Juni lalu, kami bisa menurunkan tunggakan, masih kurang dari 5%, tetapi berlanjut hingga akhir September sudah 9% untuk tahun 2017, nilainya sekitar Rp 350 miliar. Kami akan mengurangi tunggakan itu," ujar dia, kemarin.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang semula ada di angka 12-13% sampai Mei, lanjut dia, saat ini di kisaran 8,5-9,6%. Dalam waktu dekat, BPPD Jateng akan membahas dengan kabupaten dan

kota terkait kinerja secara mikro, sehingga ke depan akan lebih jelas diketahui langkah apa saja yang harus diupayakan secepatnya.

Penertiban

Tujuh wilayah yang masuk zona merah, menurut dia, yakni Kabupaten Temanggung, Banjarnegara, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, serta Kota Semarang 1 dan 3.

Ia menyatakan justru di kota-kota besar yang seharusnya penerimaan pajak daerah bisa dioptimalkan, misalnya Kota Semarang dan Surakarta, namun sebaliknya.

Di kota besar, kata dia, orang cenderung malas membayar kewajiban pajaknya. Di zona hijau ada 11 kabupaten dengan pertumbuhan di atas 14% dan di zona kuning 17 kabupaten dengan pertumbuhan antara 8 dan 13%.

"Pertumbuhan tertinggi di Kota Tegal 26%, diikuti Kabupaten Semarang 25% dan Demak 24%," papar dia.

Pihaknya bersama kepolisian akan menertibkan kendaraan bermotor yang setelah dua tahun masa berlaku STNK

apabila tidak melaksanakan pengesahan berturut-turut dalam dua tahun, kendaraan akan diblokir.

"Hal itu sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor," jelas Ihwan.

Masyarakat diimbau agar secara tertib membayar pajak, termasuk para pemilik kendaraan mewah karena kontribusinya bakal membantu belanja pembangunan, mengingat sumber dana pendapatan Pemprov berupa pendapatan asli daerah (PAD) 83% mengandalkan pajak daerah, khususnya dari PKB.

Perlemahan rupiah, kata dia, turut mendorong kenaikan harga kendaraan yang menyebabkan daya beli masyarakat mulai tersendat, ditambah lagi suku bunga kredit juga naik.

"Masyarakat menganggap STNK berlaku lima tahun, dia berhak mengendarai di jalan, padahal setiap tahun harus disahkan supaya kendaraannya menjadi legal. Gangguan yang terjadi di PKB dan pajak daerah akan sangat membebani APBD," tegas dia.

Untuk menarik masyarakat membayar PKB, kata dia, pemerintah menyediakan hadiah mobil yang akan diundi pada akhir November mendatang. Apresiasi itu diberikan bagi pembayar pajak yang tepat waktu, termasuk poin tambahan dengan membayar melalui aplikasi Sakpole.

"Ada mobil dan juga 47 unit kendaraan roda dua kami sebar di 47 samsat baik pusat maupun pembantu. Jadi kesempatan untuk menang makin besar," tandas dia. (J14-18)